

PENGAWASAN INTERNAL OLEH INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Muhammad Irhamuddin Barmawi¹, Khikmawanto²

*Universitas Yuppentek Indonesia
irhammudin292@gmail.com¹, khikmawanto@uyi.ac.id²*

ABSTRACT

This research discusses the crucial role of the Government Internal Control System (SPIP) in maintaining accountability and transparency in the administration, particularly in South Tangerang City. In the pursuit of clean and effective governance, internal oversight conducted by the Inspectorate of South Tangerang City plays a strategic role. The research methodology employed is qualitative descriptive, aiming to gain a profound understanding of the Inspectorate's role in supervising related Regional Working Units (SKPD) and identifying factors influencing their performance. In this study, it was found that the Inspectorate has taken significant corrective actions and provided recommendations to the entities under its supervision. However, several hindering factors, such as limited human and technological resources, need to be addressed to enhance the effectiveness of oversight. Therefore, proposed recommendations include enhancing human resources, investing in technology, strengthening coordination, budget evaluation, sustainable innovation, and effective communication. By implementing these recommendations, the Inspectorate of South Tangerang City can more effectively uphold the integrity and quality of municipal administration, foster good governance, and ensure high levels of accountability in public service delivery.

Keywords: Internal Oversight, Inspectorate, South Tangerang City Governance

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran penting Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Dalam upaya mencapai pemerintahan yang bersih dan efektif, pengawasan intern yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan memiliki peranan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Inspektorat dalam pengawasan SKPD terkait, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Inspektorat telah melakukan tindakan pembenahan yang signifikan dalam pengawasan internal, dengan mengambil tindakan korektif dan memberikan rekomendasi kepada entitas yang diawasi. Namun, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, saran-saran yang diusulkan meliputi peningkatan sumber daya manusia, investasi dalam teknologi, penguatan koordinasi, evaluasi anggaran, inovasi berkelanjutan, dan komunikasi yang efektif. Dengan menerapkan saran-saran ini, Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat lebih efektif dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kota, menciptakan tata pemerintahan yang baik, dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Kata Kunci: Pengawasan Internal, Inspektorat, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik diwujudkan dalam pemerintahan yang bersih dan berjalan efektif di negara di mana masyarakatnya menghormati hukum. Upaya mencapai pemerintahan yang bersih membutuhkan pemerintah dengan moralitas tinggi, sikap proaktif, dan mekanisme *check and balances* yang kuat. Menurut Mardiasmo (2008), dalam pelaksanaan pelayanan publik, manajemen yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, harus dijalankan. Oleh karena itu, alat kendali seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan untuk memastikan akuntabilitas tinggi.

SPIP memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan teratur. Pengawasan intern yang dilakukan oleh SPIP, seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi. SPIP bukan hanya alat teknis, tetapi juga fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki peran penting sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang melakukan pengawasan internal. Melalui pengawasan, Inspektorat membantu mencegah penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dalam penelitian sebelumnya (Falah, 2005), terungkap bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas sektor publik di Indonesia semakin meningkat. Namun, temuan menunjukkan bahwa kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan. APIP memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mardiasmo (2008) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam mendukung pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. APIP, sebagai unit pemeriksaan internal, memiliki peran dalam pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (auditor), jumlah auditor yang kurang, pedoman atau kebijakan pengawasan yang masih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan yang kurang kuat (Aji Kusyanuarto, & Rusdi Akbar, 2018)

Pentingnya pengawasan dalam pemerintahan daerah juga tercermin dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran adalah kunci untuk memastikan alokasi yang efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan dapat berfungsi sebagai sinyal awal untuk mengantisipasi masalah dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks audit pemerintahan, kelemahan praktik audit pemerintahan di Indonesia mencakup ketidaktersediaan indikator kinerja yang memadai dan perdebatan mengenai ukuran kualitas audit. Evaluasi peran Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat melibatkan kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia, jumlah auditor yang kurang, pedoman pengawasan yang kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan yang kurang kuat.

Pengukuran kualitas audit oleh APIP wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pernyataan standar umum SPKN menekankan perlunya kecakapan profesional dan pengetahuan yang memadai pada pemeriksa. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa, termasuk APIP, perlu memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan, dan evaluasi untuk memastikan keahlian auditor. Dalam praktiknya, kinerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebagai pengawas internal tercermin dari kegiatan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Efektivitas pengawasan Inspektorat memainkan peran penting dalam mewujudkan good governance dan clean government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat melibatkan berbagai aspek, baik dari dalam unit pengawasan itu sendiri maupun dari institusi pemerintah secara keseluruhan. Pemerintahan yang baik memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif. APIP, sebagai lembaga pengawas internal, memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Peningkatan kapabilitas APIP menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan audit pemerintahan.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pengawasan internal oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Kota Tangerang Selatan menjalankan pengawasan intern terhadap SKPD terkait di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah khususnya Kota Tangerang Selatan dalam memperbaiki sistem pengawasan intern yang ada, memperkuat peran inspektorat, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di SKPD Kota Tangerang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pengawasan

Menurut Sujamto (Hafulyon & Fitria, 2015 : 217) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai pelaksanaan tugas sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan Pengawasan sering dinamakan dengan *controlling* yang artinya mengawasi atau pengawasan. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah dan akan direncanakan berjalan dengan sebagai mestinya (Hafulyon, 2010 : 106).

Tujuan Pengawasan

Menurut Hasibuan (2013:363), terdapat beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi :

1. Perubahan Lingkungan Organisasi :
Lingkungan organisasi terus berubah dengan munculnya inovasi produk, pesaing baru, penemuan bahan baru, dan peraturan pemerintah baru. Fungsi pengawasan membantu manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang mempengaruhi barang dan jasa organisasi, memungkinkan organisasi menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang muncul.
2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi :
Semakin besar organisasi, semakin dibutuhkan pengawasan formal. Pengawasan oleh manajer membantu mengurangi risiko dalam organisasi yang kompleks.
3. Kesalahan-kesalahan :
Anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan pimpinan mendeteksi kesalahan sebelum menjadi kritis, memberikan kontrol yang diperlukan.
4. Kebutuhan Manajer untuk Mendelegasikan Wewenang :
Mendelegasikan wewenang kepada bawahan tidak mengurangi tanggung jawab atasan. Sistem pengawasan membantu manajer memeriksa pelaksanaan tugas bawahan yang telah didelegasikan, memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pokok pengawasan, menurut Moekijat (2008: 134), dapat diringkas sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Kegiatan :
Pengawas terlibat dalam berbagai kegiatan, baik dengan mengawasi sejumlah kecil atau banyak bawahan, tergantung pada jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab unitnya.
2. Memberikan Pelajaran sebagai Penghubung:
Kesadaran akan jabatan pengawas dalam struktur organisasi penting untuk memahami kekuatan-kekuatan yang memengaruhi kemampuan pengawas untuk berfungsi secara efektif.

3. Motivasi dan Pengawasan Pekerjaan Pegawai :

Fungsi utama pengawas adalah memotivasi dan mengawasi pekerjaan pegawai. Pengawas bertanggung jawab menciptakan kondisi dan rangsangan yang mendorong pegawai untuk mencapai tujuan individu dan organisasi.

4. Pengembangan Peran Pegawai :

Pengawasan memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman kepada pegawai dan ikut serta dalam pengambilan keputusan organisasi.

5. Memfasilitasi Penyesuaian Pegawai :

Dari penerimaan hingga keluarnya pegawai, pengawasan memainkan peran dalam memudahkan penyesuaian pegawai dengan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang berlaku.

Jenis-Jenis Pengawasan

Dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullung (2012: 176) dapat diringkas sebagai berikut:

1. Waktu Pengawasan :

- Preventif : Dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan, dengan tindakan pencegahan untuk menghindari masalah di masa depan.
- Repressif : Dilakukan setelah rencana dijalankan, dengan mengukur hasil sesuai standar yang telah ditentukan.

2. Objek Pengawasan :

- Produksi : Terkait kuantitas atau kualitas hasil produksi perusahaan.
- Keuangan : Menitikberatkan pada bidang keuangan, termasuk pemasukan, pengeluaran, biaya produksi, dan laba/rugi.
- Waktu : Fokus pada waktu, untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana.
- Manusia dan Kegiatan : Memantau kegiatan dan kepatuhan terhadap instruksi, tata kerja, atau manual.

3. Subjek Pengawasan :

- Intern : Dilakukan oleh atasan atau petugas yang bersangkutan, disebut juga sebagai pengawasan vertikal.
- Ekstern : Dilakukan oleh pihak di luar organisasi, juga dikenal sebagai pengawasan sosial atau informan.

4. Cara Mengumpulkan Fakta untuk Pengawasan :

- Peninjauan Pribadi : Meninjau secara langsung untuk melihat pelaksanaan pekerjaan.
- Interview atau Lisan : Mengumpulkan fakta melalui laporan lisan dari bawahan.
- Laporan Tertulis : Pertanggungjawaban kepada atasan melalui laporan tertulis, memberikan gambaran tentang pekerjaan.
- Laporan dan Pengawasan pada Kekecualian : Dilakukan berdasarkan kejadian atau hal-hal istimewa yang dikecualikan dari kondisi normal.

Unsur-Unsur Pengawasan

Menurut Quible dalam (Hafulyon dan Fitria R, 2015) proses pengawasan akan kurang optimal tanpa unsur-unsur berikut :

1. Faktor yang diawasi
Sebelum pengawasan dilakukan stakeholder akan diberikan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang akan diawasi. Pengawasan terhadap faktor yang tidak terlalu penting akan mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga.
2. Identifikasi hasil yang diharapkan
Parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari pekerjaan yang dilakukan mengakibatkan pengawasan tidak berjalan dengan efektif.
3. Pengukuran kinerja
Dalam pengukuran kinerja hasil aktual harus diukur terlebih dahulu baru kemudian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Dari sanalah dapat dilihat kinerja bawahan sudah bagus atau belum.
4. Aplikasi tindakan pembenahan
Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, tindakan koreksi perlu dilakukan untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi dengan mengimplementasikan hal-hal yang dianggap perlu.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang peran Inspektorat Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pengawasan intern SKPD terkait, serta faktor-faktor yang akan dievaluasi meliputi struktur organisasi dan kelembagaan Inspektorat, sistem pengawasan yang diterapkan kinerja inspektorat dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran serta upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pengawasan intern. Responden dalam penelitian ini yaitu Kasubbag Perencanaan Program Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Ketua Tim Auditor Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang paling mengetahui terkait permasalahan penelitian. Sedangkan observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai peran Inspektorat Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pengawasan intern SKPD. Data primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada responden. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen di Kantor Inspektorat Tangerang Selatan.

Pemilihan informan dilakukan dengan penggunaan *key informan* (informan kunci), yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta mendapatkan data yang spesifik mengenai pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data; mempelajari dan menganalisis struktur organisasi; mempelajari dan menganalisis dokumen; memberikan alternatif pemecahan masalah; dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi. Penelitian dilakukan di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten khususnya di Kantor Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada bulan Maret hingga September 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden, diperoleh hasil penelitian mengenai faktor yang diawasi dalam pengawasan internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa inspektorat memiliki fokus utama dalam menjalankan tugas pengawasan mereka. Fokus ini mencakup berbagai aspek, seperti memastikan bahwa aparat pengawas internal (APIP) menjalankan fungsi konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) dengan baik, termasuk audit, *review*, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPPR) digunakan untuk menentukan fokus utama pengawasan, dengan penilaian terhadap Governance Risk Control (GRC) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program-program yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, menjadi prioritas. Besaran anggaran yang dikelola oleh OPD juga mempengaruhi pengawasan, dengan OPD yang memiliki anggaran besar mendapatkan perhatian lebih dalam pemeriksaan.

Tantangan dalam pengawasan mencakup pemahaman terhadap peraturan terkait keuangan dan administrasi, sementara kolaborasi dengan berbagai entitas, baik internal maupun eksternal, menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Kolaborasi ini melibatkan unit pemerintah lainnya, lembaga audit eksternal, lembaga pengawas, dan bahkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan kota. Dengan demikian, Inspektorat Kota Tangerang Selatan berusaha untuk menjalankan pengawasan yang holistik dan efisien guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Identifikasi hasil yang diharapkan dalam Pengawasan Internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai anggota Inspektorat Kota Tangerang Selatan, didapatkan hasil bahwa identifikasi hasil yang diharapkan dalam pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota adalah sebuah proses yang kompleks dan penting. Inspektorat memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka, yang pada dasarnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan tumpuan pada efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Semua ini mencerminkan peran sentral inspektorat dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.

Proses identifikasi hasil yang diharapkan ini dilakukan dengan cermat dan merangkum berbagai pendekatan, seperti analisis risiko, audit sebelumnya, partisipasi masyarakat, dan pemantauan perubahan regulasi. Hasil yang diharapkan diformulasikan secara hati-hati, seringkali dalam bentuk indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif. Inspektorat juga menggunakan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai panduan untuk mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Beberapa contoh hasil yang diharapkan yang ditekankan oleh anggota inspektorat meliputi peningkatan kualitas layanan publik, penurunan kasus penyalahgunaan dana publik, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan keuangan kota, dan peningkatan keberlanjutan proyek infrastruktur. Semua hasil yang diharapkan ini memiliki karakteristik yang jelas dan dapat diukur, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.

Tetapi, wawancara juga mencatat bahwa proses identifikasi hasil yang diharapkan dapat menjadi tantangan jika parameter atau parameter tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk terus memperbaiki proses ini agar pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan anggota Inspektorat Kota Tangerang Selatan menggambarkan komitmen mereka untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kota dan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien. Hasil yang diharapkan yang telah mereka rumuskan menjadi ukuran keberhasilan dari upaya pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat, yang pada akhirnya bertujuan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah kota dan masyarakatnya. Dalam hal ini, inspektorat memegang peranan kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Kota Tangerang Selatan.

Pengukuran Kinerja dalam Pengawasan Internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam keseluruhan, hasil wawancara dengan berbagai pihak di Inspektorat Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menerapkan metode pengukuran kinerja yang efektif dan komprehensif. Metode ini membantu mereka mengevaluasi hasil dari pengawasan internal mereka dengan baik, yang sesuai dengan teori Quible mengenai pengukuran kinerja sebagai langkah berkelanjutan dalam pengawasan internal. Selain itu, komitmen mereka terhadap perbaikan dan inovasi dalam metode mereka juga memperkuat keyakinan bahwa Inspektorat memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemerintahan di wilayah mereka.

Aplikasi Tindakan Pembenahan dalam Pengawasan Internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan.

Aplikasi Tindakan Pembenahan dalam Pengawasan Internal Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah berhasil memastikan bahwa rekomendasi mereka memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemerintahan kota. Tindakan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana. Langkah-langkah pemantauan dan audit ulang juga menjadi kunci dalam menjaga efektivitas tindakan pembenahan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat telah mengimplementasikan pengawasan internal dengan menggunakan metode pengukuran kinerja yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek, seperti kepatuhan, efektivitas rekomendasi, implementasi temuan hasil pengawasan, hingga kepuasan pemangku kepentingan. Mereka juga menerapkan Aplikasi Tindakan Pembenahan sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Tindakan pembenahan ini meliputi memberikan rekomendasi, perubahan prosedur, pelatihan, dan tindakan korektif lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, dalam menjalankan pengawasan internal, Inspektorat Kota Tangerang Selatan juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Salah satunya adalah kebutuhan akan sumber daya manusia

yang lebih banyak dan terampil untuk mengatasi volume pekerjaan yang meningkat. Terdapat juga kendala dalam pengadaan teknologi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi proses pengawasan internal. Selain itu, koordinasi yang lebih baik dengan entitas yang diawasi dan pemangku kepentingan juga merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pengawasan internal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internalnya, Inspektorat Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan peningkatan sumber daya manusia, investasi dalam teknologi yang sesuai, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan peran penting mereka dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memberikan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menghadapi tugas yang semakin kompleks.
2. Memprioritaskan investasi dalam teknologi untuk mendukung efisiensi pengawasan internal melalui penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi canggih.
3. Membangun kerja sama yang erat dengan entitas yang diawasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan dan tindakan pembenahan.
4. Mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk Inspektorat guna investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan.
5. Tetap terbuka terhadap inovasi dalam metode pengukuran kinerja dan tindakan pembenahan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintah.
6. Meningkatkan komunikasi dengan entitas yang diawasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi yang baik dari rekomendasi dan temuan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafulyon. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press. Hlm. 106.
- Hafulyon dan Fitria, R. (2015). *Manajemen Perkantoran*. Batusangkar : STAIN Batusangkar.
- Moekijat. (2008). *Manajemen Kepegawaian*. Bandung : Pioner Jaya. Hlm. 134
- Manullung. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm. 176.
- Mardiasmo (2000), *Otonomi & Manajemen Keuangan*, HIMMEP, Yogyakarta. Hlm. 96-101
- Mardiasmo (2008), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta. hlm. 43-50
- Prof Dr. Mardiasmo (2005), *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*.
- Sugiyono, (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.

Perundang-undangan:

- Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam pasal 10 ayat 2
- Perwal Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan.